FUNGSI BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG (BAMUSKAM) TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KAMPUNG WAROI DISTRIK YENDIDORI KABUPATEN BIAK NUMFOR

Ismar HI Garuan

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak

Email : ismar_garuan@iyb.ac.id

Abstrak

Badan Musyawarah Kampung atau disebut dengan nama lain (BAMUSKAM) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung di Kampung Waroi Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor. Teknik pengumpulan data yang digunakan seperti; observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala kampung yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BAAMUSKAM terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: *Bamuskan Penyelenggaraan Pemerintah.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah yang tujuannya adalah untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan secara desentralisasi yang menempatkan Kampung sebagai "*garis depan*" dari sistem Pemerintahan Indonesia dan keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Partisipasi dan peranan masyarakat Kampung sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintahan Kampung sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warga negara. Dalam Undang-Undang Nomor 6

tahun 2014 tentang Desa, dikatakan bahwa Kampung sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada umumnya wilayah kampung terdiri atas daerah pertanian dan kelautan (perikanan) sehingga sebagian besar mata pencaharian masyarakat kampung adalah sebagai petani dan nelayan tradisional.

Adapun pekerjaan yang lain adalah pekerjaan sampingan. Dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan kampung, Kepala kampung beserta perangkat kampung dibantu oleh Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) yang dibentuk

sebagai perwujudan nilai demokrasi yang ada di kampung. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM), Pasal 55 mengatakan bahwa fungsi BAMUSKAM adalah membuat Peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kampung. BAMUSKAM sebagai badan perwakilan yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung. Keberadaan Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) dalam pemerintahan kampung adalah bukti keterlibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung yang mana Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) dapat dianggap sebagai "*parlemen*"-nya kampung yang merupakan lembaga baru di kampung pada era otonomi daerah di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, yang termuat dalam pasal 58 yaitu: "Jumlah anggota Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Kampung. Penyelenggaraan pemerintahan kampung akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila diberbagai lapisan masyarakat Kampung menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintah Kampung yang didampingi oleh BAMUSKAM, sehingga

masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah kampung yang lebih bersih dari unsur-unsur KKN. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ternyata hasil audit yang dilakukan oleh BAMUSKAM terhadap laporan pertanggung jawaban kepala Kampung, ada beberapa program pembangunan kampung tidak terpenuhi seperti program pembangunan Rumah Layak Hunibagi masyarakat ternyata ada 3 rumah yang tidak selesai 100% dimana RT 03 terdapat 2 rumah dan RT 01, 1 rumah. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari BAMUSKAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwa Badan Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BAMUSKAM, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 angka (4) :21 "Badan Musyawarah Kampung atau disebut dengan nama lain (BAMUSKAM) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis." Badan Musyawarah Kampung/Desa yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah Badan Musyawarah Kampung yang terdiri atas pemuka pemuka masyarakat di Kampung Waroi distrik yendidori kabupaten biak numfor yang berfungsi membuat peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Kampung/desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung/Desa.

Adapun fungsi Badan Musyawarah Kampung yang di maksud dalam tugas pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tercantum dalam PERMENDAGRI Nomor : 110 Pasal : 31 Tahun 2016, antara lain adalah ;

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan kampung bersama Kepala Kampung
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Kampung,dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Kampung

Sementara pada Pasal 51 disebutkan hak dan kewajiban BAMUSKAM antara lain adalah (1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung. (2) menyatakan pendapatan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaa kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan masyarakat Kampung. (3) mendapatkan biaya operasinal pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan Belanja Kampung.

Pada masa akhir jabatan Kepala Kampung, BAMUSKAM bertugas untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kampung tentang berakhirnya masa jabatan enam bulan sebelumnya. Kemudian, BAMUSKAM berhak untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Kampung yang bersifat mandiri dan tidak berpihak. Panitia ini terdiri dari unsur perangkat kampung, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Kampung. Menurut Bohari (2004) Fungsi Badan Musyawarah

Kampung (BAMUSKAM) pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Sule dan Saefullah (2005) bahwa Fungsi Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Menurut Terry dan Leslie dalam Sule dan Saefullah (2005) mengemukakan bahwa fungsi Badang Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) adalah cara menentukan, apakah diperlukan sesuatu penyesuaian atau tidak oleh karena itu ia harus merupakan bagian integral dari sistem manajemen. Menurut Sudarsono dan Edilius (2002) mengemukakan bahwa Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) berfungsi agar dapat diperoleh hasil produksi berupa barang dan jasa yang berkualitas dalam jangka waktu yang sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Penyelenggaraan Pemerintahan kampung adalah proses pelaksanaan kegiatan, dan segala urusan-urusan pemerintahan yang dilaksanakan di setiap kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurusurusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesiadan segala urusan-urusan itu dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan dan menjalankan urusan itu badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian

Berdasarkan Judul penelitian yang penulis angkat dan memperoleh data-data maka, lokasi penelitian dilakukan pada Kampung Waroi Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor .

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian adalah jenis penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat Deskriptif dan cenderung menggunakan analisis (Sugiyono, 2005) menyatakan bahwa metode Deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Sumber data

Data Primer atau data utama adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui Observasi (pengamatan) dan Interview (wawancara) kepada responden. Data Sekunder atau data pendukung adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai beberapa bentuk teknik pengumpulan data Adapun teknik-teknik tersebut adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengolah data yang telah dikumpulkan dari lapangan atau kepustakaan untuk menjadi seperangkat hasil, baik dalam penemuan maupun dalam pengolahan data. Untuk menganalisis data dalam masalah ini penulis menggunakan logika deduksi, dengan membandingkan teori yang metar belakangi permasalahan. Data yang diperoleh dari lapangan akan diolah dengan cara mengumpulkan semua data yang ada. Data yang dikelompokkan, diseleksi dan selanjutnya dianalisis, metode yang digunakan dalam analisis data Kualitatif yaitu menganalisis data yang didasarkan pada kualitas data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan pokok penelitian, kemudian diuraikan dalam bentuk bahasa deskriptif .

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Bamuskam

Bagaimana caranya supaya kedepan, peran fungsi Bamuskam terhadap penyelenggaraan pemerintah kampung Waroi Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor, dapat berjalan semaksimal mungkin. Kata kuncinya adalah "Badan musyawarah kampung seharusnya dapat ditinjau lebih lanjut supaya tidak terjadi persoalan tumpang tindih manajemennya, tetapi sesungguhnya lebih baik dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan. Fungsi Bamuskam dlm meningkatkan penyelenggaraan masyarakat kampung sudah membaik, dilihat dari kepemimpinan dalam mendukung, mendorong dan membangun pemberdayaan masyarakat, pemberian fasilitas, dan komunikasi yang terjalin

kepada masyarakat, namun ini belum cukup memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat disebabkan karena fasilitas yang di berikan masih sangat kurang maka, sebagai pemimpin dalam mengambil kebijakan untuk membuat program perencanaan pembangunan masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam memberikan saran dan masukan yang memang benar-benar merupakan kebutuhan mereka dan dalam pemecahan masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Seorang kepala kampung di tuntut memiliki kemampuan dan metode yang tepat untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan. Tuntutan adanya peran kepala kampung dalam pemberdayaan masyarakat kampung mempunyai tanggung jawab untuk mendorong partisipasi terhadap pembangunan. Hal ini mampu memperdaya lembaga-lembaga yang ada di tingkat kampung demi mencapai suatu tujuan. Fungsi-fungsi inilah yang diharapkan terwujud untuk memberikan perkembangan kampung di kampung waroi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada Titus Mirino selaku Ketua BAMUSKAM, mendapatkan penjelasannya mengenai fungsi BAMUSKAM di Kampung Waroi, bahwa Fungsi BAMUSKAM di Kampung Waroi berjalan dengan baik, yaitu tetap menampung aspirasi masyarakat kampung dan menyalurkan aspirasi tersebut kepada kepala kampung. Penyampaian disampaikan dilakukan dengan lisan dimanapun kami bertemu. Adapun aspirasi yang disampaikan adalah jalannya pembangunan Rumah layak huni bagi

kebutuhan masyarakat kampung Waroi harus merata.

Selain itu, hasil wawancara dengan anggota BAMUSKAM yang lain mendapatkan penjelasannya mengenai fungsi BAMUSKAM di Kampung waroi, bahwa: Fungsi BAMUSKAM sebagai penampung aspirasi masyarakat kampung waroi, melalui ketua BAMUSKAM. Namun, untuk masyarakat kampung yang bertempat tinggal dekat dengan dusun tempat tinggal saya menyalurkan aspirasi langsung kepada saya.

Aspirasi yang disampaikan yaitu jalanan tani dan pembangunan menuju dusun ke dusun. Mengenai fungsi BAMUSKAM yaitu menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh anggota BAMUSKAM dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kampung berdasarkan wawancara dengan Bapak Titus Mirino selaku ketua BAMUSKAM bahwa: langkah yang dilakukan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kampung dengan menyampaikan kepada kepala kampung pada saat diadakan rapat di kantor kepala kampung, namun biasanya kepala kampung tidak terlalu menanggapi aspirasi tersebut. Sedangkan langkah yang dilakukan dalam menyalurkan aspirasi tersebut, yaitu:” Menyampaikan kepada ketua BAMUSKAM, lalu dilakukan rapat bersama dengan anggota BAMUSKAM lain.” Dari hasil wawancara tersebut, terdapat ketidaksesuaian dengan pendapat dari masyarakat kampung itu sendiri,

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Festus Amsamsyum berpendapat bahwa :

“.....Saya biasanya menyalurkan aspirasi langsung kepada Kepala Kampung atau kepala Dusun, hal ini dikarenakan BAMUSKAM tidak memiliki kedekatan kepada masyarakat kampung dan dan saya juga tidak mengetahui bahwa fungsi BAMUSKAM adalah tempat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kaampung waroi”.

Hal tersebut, serupa dengan Bapak Habel Amsamsyum dan Ibu Nella Parka yang berpendapat bahwa selama ini aspirasi disampaikan langsung kepada Kepala Kampung karena mereka tidak tahu sama sekali mengenai Fungsi BAMUSKAM adalah tempat untuk menyalurkan aspirasi. Selain itu, Menurut mereka selama ini pun pihak pemerintah Kampung tidak pernah mewadahi atau memberikan tempat bagi mereka untuk dapat menyalurkan aspirasi.

Kepemimpinan merupakan sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan untuk di jadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan terhadap peningkatan aparat kampung, yang dipimpinya agar mereka mau melaksanakan tugas-tugas yang di berikan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa. Kemampuan seseorang dalam memimpin juga sangat berpengaruh dalam proses proses pemberdayaan masyarakat, yang mana dalam kepemimpinan kepala kampung sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pemberdayaan masyarakat di kampung waroi. Peran kepala kampung merupakan kemampuan seseorang dalam memposisikan diri sesuai ruangan dan waktu serta dapat memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu seorang kepala kampung harus

tahu dan mampu memainkan peranannya sebagai seorang pemimpin di kampungnya. Seperti kutipan dari defenisi peran kepemimpinan merupakan perilaku yang di tuntutan untuk memenuhi harapan dari apa yang di perankan. Sehingga seorang kepala kampung ataupun seorrrang pemimpin dalam memimpin harus tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam kepemimpinannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penjabaran maka kesimpulan dari penelitian ini bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengawasan peraturan desa yang dilakukan oleh BAMUSKAM Waroi dimana kurangnya pemahaman anggota BAMUSKAM terhadap fungsinya dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Musyawarah kampung (BAMUSKAM) yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala kampung yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BAAMUSKAM terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad. 2015. Menguak Tabir Hukum, edisi kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- A.W Widjaya, 2003. Pemerintahan desa/marga, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.,1993. Pemerintah

- Desa dan Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo, Jakarta. Hlm. 35.
- Burhan Ashofa, 2007, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta
- Dinas Kebudayaan Dan Provinsi Jawa Barat, 2008. Buku Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Desa, Balai Pengelola Kepurbakalaan, Jawa Barat.
- Fitra, Melisa. 2009. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa", Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unhas, Makassar.
- HR, Ridwan. 2003. Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta.
- Jamali, Abdoel. 2012 Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan Ke-18.
- Salim, 2010. Pengembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta